

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan tentang kebijakan kepala sekolah dan peran komite sekolah di SMKN Kabupaten Tangerang. Tetapi sebelumnya akan digambarkan keberadaan perpustakaan sekolah di SMKN Kabupaten Tangerang Sangat memprihatinkan dengan kemajuan perpustakaan yang sudah menuju digital *library* dan sudah dinyatakan bahwa perpustakaan itu jantung sekolah dan semua kepala sekolah mengatakan perpustakaan sekolah sangat penting. Hal itu senada dalam bukunya James Thompson dalam Suherman (2009) yang mengatakan bahwa perpustakaan adalah sebagai sumber kekuatan, ini berasal dari kenyataan bahwa perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan dan “*the repositories*” dari rekaman prestasi dan penemuan kemanusiaan. Pada kenyataannya banyak SMKN di Kabupaten tangerang banyak yang tidak memiliki jantung atau tidak menyelenggarakan perpustakaan.

4.1. Profil Perpustakaan SMKN Kabupaten Tangerang

Sarana prasarana yang dimiliki oleh SMKN satu dan dua, lokasi perpustakaan berada jauh dari sumber kegiatan siswa dan memiliki luas ruangan kurang lebih, luasnya hampir sama dengan ruang belajar atau ruang kelas, terdapat sarana penunjang seperti, meja layanan yang merangkap dengan kegiatan pengolahan, dan memiliki sebuah komputer untuk melakukan kegiatan pengolahan data koleksi yang dimiliki, terdapat juga rak buku, lemari katalog, bangku dan meja untuk membaca, untuk di SMKN 1 sudah dilengkapi sarana internet berikut LCD, rak penitipan tas, dan rak untuk display majalah.

Koleksi terdiri dari banyak buku paket yang diperoleh dari pusat, dengan 750 judul yang berjumlah 13.102 buku untuk SMKN 1 dan untuk SMKN 2 memiliki koleksi buku berjumlah 2059 buku dan untuk judul belum diketahui jumlahnya. Disimpan dirak buku berdasarkan program studi yang dimiliki, seperti program Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Pendingan Tata Udara dan Teknik Komputer dan Jaringan, bahkan ada juga buku paket untuk jurusan tata busana dan pertukangan dimana yang sebenarnya sekolah SMKN 1 tidak

memiliki program tata busana dan pertukangan. Banyak buku yang tahun terbitnya sudah lama yaitu ada buku yang tahun terbitnya tahun 1998 juga terdapat satu majalah seperti “hidayah” yang sudah lama tahun terbitnya yaitu terbit tahun 2000. Menurut Kepala Perpustakaan SMKN 2 tidak difokuskan pada koleksi tetapi akan difokuskan pada IT dalam perpustakaan.

Pengunjung pada saat itu tidak ditemukan, pada saat itu hanya ada satu sampai dua siswa dan siswi yang berada di dalam perpustakaan diantaranya satu mantan siswa yang diberi tugas membantu proses penscenen dan mengentri data pada sebuah komputer, dan 2 siswi yang diberi tugas oleh kepala perpustakaan untuk memilah buku-buku yang akan discen, berdasarkan informasi yang didapat dari petugas perpustakaan biasanya rata-rata setiap hari akan dikunjungi siswa dan guru sekitar 13 sampai dengan 20 pemustaka, dengan memiliki jumlah anggota perpustakaan untuk SMKN 1 berjumlah 2894 anggota dan untuk SMKN 2 berjumlah 1557 anggota, yang terdiri siswa dan guru. Waktu pelayanan Perpustakaan dibuka pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 karena waktu belajar di sekolah ada 2 sift, yaitu sebagian siswa belajar pagi masuk pukul 07.00 pulang pukul 13.15 dan sebagian siswa belajar siang masuk pukul 13.45 pulang pukul 17. 15.

. Perpustakaan dikepalai oleh seorang guru yang mantan wakil bidang kurikulum untuk SMKN 1 dan belum pernah mendapatkan pelatihan untuk diklat dibidang perpustakaan, tetapi untuk SMKN 2 yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk menjabat menjadi Kepala Perpustakaan adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan dengan memiliki pengalaman menjadi Kepala Perpustakaan di Perguruan Tinggi swasta yaitu UNIS Tangerang selama 15 tahun dan menjadi Ketua umum FPPT (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi) di Propinsi Banten dan baru ditunjuk menjadi kepala perpustakaan masih berjalan 2 bulan ini, juga pengurus forum pusat koordinator wilayah 1 bagian Jawa Barat dan Banten.

Dikatakan oleh Kepala Perpustakaan SMKN 2 karena menjabat Kepala Perpustakaan baru 2 bulan, dan belum ada satu tahun anggaran ini, maka sumber dana secara jelas belum diketahui, dikatakan ”kemungkinan saya akan mengajukan surat resmi ke perpustakaan daerah maupun mengajukan ke diknas

pendidikan Banten, dan sebenarnya dana untuk Perpustakaan Sekolah itu ada hanya saja sekolah belum pro aktif mengajukan suber dana”, tapi waktu itu pernah mendapatkan dana dari komite Sekolah berdasarkan informasi dari Wakasek Sarana dan prasarana sebesar 2,7 juta untuk menambah koleksi perpustakaan. Dikatakan oleh Kepala Perpustakaan SMKN 1 untuk masalah dana tidak diketahui sumbernya tetapi kalau ada kebutuhan tinggal mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah.

Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Profil Perpustakaan SMKN Kabupaten Tangerang.

S M K N	TAHUN BERDIRI	PEMUSTAKA		GEDUNG / RUANG	SDM	JUMLAH KOLEKSI		DANA
		SISWA	GURU			BUKU	JUDUL	
1	1997	2807	87	ada	1 org	13.102	750	Tidak jelas
2	1975	1545	62	ada	1 org	2059	Tidak jelas	Tidak jelas
3	2009	45	9	Tidak ada	----	----	-----	-----
4	2003	688	45	Tidak ada	—	—	-----	—
5	2004	1445	61	Tidak ada	—	—	—	—
6	2008	400	22	Tidak ada	—	—	—	—
7	2008	538	52	Tidak ada	—	—	—	—
8	2009	84	15	Tidak ada	—	—	—	—

4.2. Kebijakan Kepala Sekolah

Dikatakan dalam Sutarno (2006) bahwa kebijakan bersifat situasional dan untuk mengatasi hal-hal mendesak, dalam keadaan normatif segala sesuatunya telah diatur di dalam berbagai peraturan, termasuk resiko atau sanksi jika terjadi pelanggaran. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2007) menjelaskan proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Mengacu pada standar nasional pendidikan yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2005, maka pengelolaan pada satuan pendidikan yang meliputi, pengelolaan bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang pendidik dan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan bidang keuangan telah diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Selanjutnya dalam menjalankan kebijakannya seorang kepala sekolah harus berpedoman pada standar nasional pendidikan.

4.2.1. Kebijakan Kepala Sekolah Pada Sarana Prasarana

Kebijakan kepala sekolah dalam mengatur sarana prasarana pendidikan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan, melalui proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melayani anggota masyarakat sekolah baik itu kepada guru, murid, staf bahkan kebutuhan untuk proses kegiatan dalam belajar mengajar.

Selaku kepala sekolah dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana, dalam mengambil kebijakan harus berpedoman dengan standar nasional pendidikan, yang ditunjang oleh standar minimal sarana prasarana untuk SMK, seperti tertuang dalam Permendiknas No. 40 tahun 2008 tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, ruang kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Seperti dikatakan oleh informan Jam, Mah dan informan Lin untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan siswa SMK sangat diperlukan ruang yang digunakan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diterima pada saat belajar di dalam kelas, maka sangat diperlukan ruang praktek atau ruang kerja.

“Oh jelas selama saya menjabat 2 tahun menjadi Kepala Sekolah target pertama pembenahan sarana dan prasarana fisik bangunan termasuk gerbang depan. Kedua pada tahun 2009/2010 peningkatan kualitas/ mutu dimana Bapak mentargetkan akreditasi sekolah untuk 4 program keahlian yaitu Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Pendingin Tata Udara dan Teknik Komputer dan Jaringan yang semula terakreditasi B tetapi pada

tahun 2009 semua program terakreditasi A oleh BAS (Badan Akreditasi Sekolah) tingkat propinsi pada tahun yang sama 2009 saya mencanangkan tersertifikasi manajemen sekolah dengan berstandar ISO 9001/2008 yang teralisasi pada tanggal 16 Januari 2010” (Jam)

“Menurut Bapak harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sarana prasarana dalam menghadapi akreditasi yang akan datang mentargetkan untuk program Otomotif dan Teknik Komputer dan Jaringan terakreditasi A agar sama nilai akreditasinya seperti program Akuntansi, Administrasi, Budidaya Tanaman dengan melakukan persiapan-persiapan”. (Mah)

”Ya berarti harus memperhatikan kebutuhan sarana prasarana sekolah, dan apa yang paling mendesak kepentingannya harus didahulukan, terutama untuk kebutuhan ruang belajar, untuk sekarang ya ruang praktek yang paling penting”. (Lin)

Seperti sekolah Jam dan Lin akan memprioritaskan pada ruang praktek yang dianggap paling penting untuk menunjang kompetensi siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sementara di sekolah Mah akan berusaha memenuhi kebutuhan standar minimal sarana prasarana yang harus diwujudkan dalam mempertahankan nilai akreditasinya.

Dikatakan dalam Sutarno (2006) bahwa kebijakan bersifat situasional dan untuk mengatasi hal-hal mendesak, dalam keadaan normatif segala sesuatunya telah diatur di dalam berbagai peraturan, termasuk resiko atau sanksi jika terjadi pelanggaran.

Masing-masing kepala sekolah dalam mengambil kebijakan terhadap sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana kepala sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan sesuai standar yang telah ditentukan dalam rangka menghadapi akreditasi sekolahnya.

Akan dilakukan berbeda kepada sekolah yang baru berdiri atau sekolah yang harus memisahkan diri dari sekolah tempat menumpang. Memisahkan diri dengan sekolah terdahulu berarti masih terbatas oleh sarana prasarana yang dimiliki seperti dikatakan oleh informan Kam dan informan Kus.

“Tidak bisa berbuat banyak karena disini Sekolah baru pindah jadi belum bisa merencanakan apa-apa karena pindah dilokasi baru saja, masih dikonsentrasikan pada ruang kelas”. (Kus)

“Harus kreatif tetapi karena gedungnya masih numpang dan ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang TU belum punya sendiri padahal itu khan lebih prinsip saya mengusulkan tetapi karena ada pemekaran dengan adanya Tangerang selatan maka otomatis bantuan yang kami terima jadi berkurang, kemudian laboratorium baru ke perpustakaan dan walaupun dari pemerintah ga ada bantuan, komitmen sekolah harus membangun yang akan menggunakan sumber dana dari DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) yang biasanya jarang sekali dana DSP untuk fisik, untuk tahun kemaren kita paksakan untuk membangun ruang kelas kelas dan kalau kita teruskan bisa menjadi 4 lantai”(Kam)

“Ya mengajukan usulan dana baik kepada Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melengkapi fasilitas yang kurang untuk diketahui program yang ada di sekolah walaupun sekolah kami masih baru banyak diminati program Perhotelan, program Otomotif, program Teknik Komputer dan Jaringan, dan akan dibuka untuk program Akuntansi, kami masih berpikir kearah sana”.(Toh)

Di sekolah tempat informan Kam masih belum memiliki ruang-ruang yang vital yaitu ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang Tata Usaha, karena masih menumpang di SMPN, karena ketiga ruang itu merupakan prasarana yang mendukung kinerja tenaga pendidik dan pendidikan untuk bekerja secara maksimal.

Seperti tertuang dalam Juklak sistem pendidikan nasional tahun 2003 tentang standar kompetensi tamatan SMK secara nyata menguasai ilmu pengetahuan dengan trampil dapat terwujud sangat didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

Dengan diangkatnya dua informan menjadi kepala pada satuan pendidikan untuk sementara waktu, karena menunggu kepala satuan pendidikan yang definitif, maka tidak bisa mengambil kebijakan walupun satuan pendidikan masih membutuhkan sarana dan prasarana. Berikut petikan hasil wawancara, seperti dikatakan oleh Ern dan Jam.

“Pastinya ada ya ...yang dilakukan Kepala Sekolah untuk memajukan sekolahnya tapi karena Ibu disini baru 2 bulan ditugaskan inipun hanya sementara menunggu Kepala Sekolah yang sebenarnya jadi tidak banyak yang saya lakukan”. (Ern)

”Bapak jalankan sesuai dengan kondisi sekolah saja, sekarang ini sudah lumayanlah belum kewalahan mengatasi ruang ruang, karena masih bisa

tertampung, semoga saja cepat ada Kepala Sekolah baru sehingga dapat bekerja dengan optimal”. (Jam)

Karena setiap sekolah akan mengalami masalah yang berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, maka kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan berdasarkan pada program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasana, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya untuk menunjang tujuan pendidikan.

4.2.2. Kebijakan Kepala Sekolah Pada Sumber Dana

Kebijakan Kepala Sekolah terhadap sumber dana harus menetapkan skala prioritas untuk efektif efisien. Faktor dana merupakan faktor yang sangat dominan, karena sebagai penyangga dari semua aktivitas yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pembiayaan pada satuan pendidikan bersumber dan diperoleh dari dana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan dari masyarakat. APBN terdiri atas dana rutin dan dana pembangunan. (Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005).

Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan dalam mengalokasikan sumber dana harus memperhitungkan dan mempertimbangkan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendukung pada tujuan yang ingin dicapai pada satuan pendidikan. Seperti diungkapkan informan Jam dan Toh dan Kam bahwa untuk satuan pendidikan sumber dana berasal dari pemerintah tetapi dalam mengalokasikannya merupakan kewenangan seorang kepala sekolah.

“Sumber dana yang Bapak gunakan untuk merealisasikan sarana prasarana berasal dari Pusat, dari pusat itu ada yang disebut BKM(Bantuan Khusus Murid), ada yang disebut BSM(Bantuan Siswa Miskin), dan ada yang disebut BOOM(Bantuan Operasional Manajemen dan Mutu), sumber berikutnya dari APBD propinsi, APBD Kabupaten dan terakhir dari Komite Sekolah. Bapak menggunakan dana secara kolaborasi dari pemerintah dan Komite Sekolah, targetnya tahun ini membangun ruang kerja jurusan mesin”. (Jam)

“Ya sumber dana berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada yang dinamakan DAK (Dana Alokasi Khusus) ini dari pemerintah daerah

dan ada juga Blogrand, dan Komite Sekolah yang akan digunakan untuk membangun kantin.”. (Toh)

“Bersumber dari pemerintah pusat namanya Blogrand 2 RKB(Ruang Kelas Baru) dan dari APBD Kabupaten yang akan diberikan tapi belum terealisasi, dapat juga bantuan untuk mutu pendidikan mendapatkan dana BOOM (Bantuan Operasional Manajemen dan Mutu) dan mendapatkan juga BKM/BSM (Bantuan Siswa Miskin) tapi dari yang saya usulkan 700 siswa tetapi hanya mendapatkan 35 siswa ya sudahlah kami sudah berusaha, karena siswa yang bersekolah di SMK ini dari kalangan menengah kebawah”. (Kam)

Sumber dana pada SMKN sebagian besar masih sepenuhnya mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan bersumber dari masyarakat yaitu sumbangan dari Komite Sekolah.

Dengan disosialisakannya SMK oleh pemerintah baik lewat media elektronik dan non elektronik yang menghimbau kepada masyarakat untuk memilih SMK sebagai sekolah yang menciptakan siswa siap kerja, maka pemerintah banyak menyediakan dana bantuan khususnya untuk SMK, seperti diungkapkan oleh informan Lin.

”Yang pasti dari pemerintah, banyak sekali sebenarnya dana untuk SMK ini karena saat ini pula pemerintah menggalakkan masyarakat untuk belajar di SMK, dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tunggu saja bantuan untuk RKB, karena sekolah ini masih masa peralihan dari SMA menjadi SMK’. (Lin)

Seperti diungkapkan oleh informan Mah, Ern, selain sumber dana berasal pemerintah masih mengandalkan bantuan orangtua murid untuk membiayai operasional sekolah.

“Di sekolah kami dalam merealisasi sarana prasarana dana berasal dari pemerintah dan dari Komite sekolah”. (Mah)

“Kami bisa membangun ini dari pemerintah pusat bisa ibu lihat ruang kelas sudah banyak tapi kalau hujan tidak bisa upacara, karena tanahnya dilapangan sangat lengket. Dan bantuan Dari Komite Sekolah, paling hanya untuk menentukan besarnya DSP’. (Ern)

Dana satuan pendidikan diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar

nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dengan menggunakan dana secara kolaborasi baik dana yang bersumber dari pemerintah dan orangtua murid.

Pengelolaan keuangan sekolah, terutama pengalokasian atau penggunaan keuangan sekolah merupakan kebijakan dari kepala sekolah sepenuhnya, karena memang sekolah yang paling mengetahui kebutuhannya. Dan sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung dari pemerintah.

4.2.3. Kebijakan Kepala Sekolah Pada Kurikulum.

Saat ini kurikulum sudah beberapa kali mengalami perubahan dan kurikulum sekarang dinamakan dengan kurikulum KTSP. Seperti diatur dalam Permen nomor 19 tahun 2005 pasal 17 bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang SD/SMP/SMA/SMK dikembangkan sesuai karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Dari gambaran kurikulum yang digunakan menjelaskan bahwa Kepala Sekolah pada satuan pendidikan diberikan keluasaan untuk mengembangkan kompetensinya yang disesuaikan dengan potensi dan budaya yang dimiliki disekitarnya. Seperti diungkapkan Jam, Mah, dengan kurikulum KTSP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi siswa.

”KTSP itu kan singkatan dari Kurikulum tingkat satuan pendidikan, Bapak selaku Kepala Sekolah memang selalu lebih mengedepankan kepentingan siswa dan selama saya menjabat 2 tahun ini banyak prestasi siswa yang sudah diraih seperti tahun ini SMKN 1 memperoleh juara UKS ditingkat Kabupaten, mengikutseratakan anak lomba kompetensi di tingkat Kabupaten, bahkan sekolah kami mendapat bantuan *frasher* yang seperti di supermarket itu beserta ruangnya sehingga anak-anak bisa langsung praktek. Jadi lebih pada membekali ketrampilan pada siswa yang nantinya bisa siap kerja”. (Jam)

”KTSP sekarang ini dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi, sekaligus melihat peluang yang ada disekitar kita, maksudnya industri yang berada di lingkungan bergerak dalam bidang apa?, dulunya SMKN ini namanya SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) karena bisa dibidang banyak lulusan yang menjadi pengangguran dan sekolah ini dekat dengan industri maka pimpinan terdahulu mengusulkan menjadi

SMK Teknologi. SMK itu kan banyak macamnya ada bisnis manajemen, teknologi, pariwisata, bangunan, pertukangan dan sebagainya”. (Mah)

Kurikulum merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk mengatur sebuah proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik sumber belajar, materi yang harus diberikan kepada siswa, dan tujuan kompetensi yang harus dicapai oleh anak didik.

Bahkan dengan KTSP setiap satuan pendidikan dapat lebih maksimal memberdayakan semua komponen yang ada pada satuan pendidikan. Dengan keterampilan yang dimiliki akan menjadikan jiwa mandiri dan berkewirausahaan. Seperti dikatakan informan Lin dan Ern dengan kurikulum KTSP lebih menggali bakat dan kompetensi yang dimiliki siswa untuk bisa mandiri.

”Begini saya setuju sekali dengan KTSP itu, karena memang anak akan memiliki kompetensi berjiwa *intreprenur* dengan mengarahkan pada pelajaran-pelajaran yang sifatnya praktek, saya selaku Kepala Sekolah akan lebih memfasilitasi kepada sarana praktek bahkan pemerintah mendukung program ini, dulunya sekolah ini SMA Syekh Nawawi Al Bantani karena setiap tahun minat masyarakatnya kurang siswanya makin mengecil jumlahnya. Maka diusulkan oleh masyarakat daerah sekitarnya dengan pendapatan rata-rata menengah kebawah dan keinginan anaknya banyak yang ingin sekolah di SMK yang jaraknya jauh dari rumah, akhirnya SMA ini menjadi SMKN 3 dan alhamdulillah sekarang baru mempunyai siswa kls X dengan jumlah 45 siswa, untuk kls XI dan kls XII masih berstatus siswa SMA dan masih bergabung. Bapak juga disini hanya sementara kemungkinan Kepala Sekolahnya akan dilantik tahun ini”. (Lin)

”Begini lo Bu, KTSP itu kegiatan pembelajaran yang diarahkan membantu siswa menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka nanti siap kerja tetapi juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat yang dia inginkan, siapa tahu dengan bakatnya itu dia bisa menghasilkan uang. Banyak sekali murid kami disini yang menjadi artis dadakan dengan kemampuan menyanyi dia bisa mengisi dari panggung ke panggung yang dapat menghasilkan uang yang katanya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kami disini baik saya, guru, staf dan Komite bekerjasama agar bisa menggali potensi yang dimiliki oleh sekolah ini untuk mencapai tujuan.” (Ern)

Dikatakan informan Kus dengan adanya kurikulum KTSP optimis siswa benar-benar dibekali sebuah keterampilan untuk siap bekerja dengan menjalin kerjasama dengan dunia kerja. Yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah mengurangi pengangguran.

”Saya optimis sekali dengan kurikulum KTSP ini akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah kami pada umumnya khususnya daerah Pasirsinang, makanya target saya setelah RKB (Ruang Kelas Baru) turun, target saya ruang laboratorium komputer jadi anak-anak bisa langsung praktek, selama ini sangat merepotkan sekali masih bergabung dengan siswa SMP yang pada akhirnya kurang maksimal untuk anak SMK karena keterbatasan ruang, hal ini yang menjadi pemikiran saya dan sudah saya usulkan. Rupanya dengan pemekaran dengan Tangerang Selatan dana bantuan semakin berkurang sekali.”(Kus)

Ditemui kendala dalam pelaksanaan KTSP pada satuan pendidikan kejuruan program pembelajarannya mengarah pada pelajaran yang sifatnya praktek sehingga diperlukan sarana prasana yang menunjang pada keterampilan dan kemahiran siswa, diperoleh informasi dari Kam, Toh dan informan Jam satuan pendidikan, menemui kendala dengan terbatasnya sarana prasarana tersebut.

”Lha itu yang merepotkan, sementara kompetensi lebih mengarah pada praktek anak yang pada kenyataannya ruang belajar saja belum punya, makanya pinter-pinternya kami mengarahkan kepada anak dan guru kalau waktunya praktek bisa dikerjakan diluar sekolah, dan memang kebetulan juga untuk kegiatan praktek administrasi dan akuntansi tidak memerlukan sarana prasarana praktek yang banyak dan mahal, paling dengan fasilitas komputer yang ada kita jadwalkan sesuai dengan jumlah siswa, memang sich kalau kurang ya memang kurang tapi bagaimana lagi kalau masih menumpang ya kita bersama-sama menggunakan sarana prasarana dengan bijak”. (Kam)

”Kita lihat dulu konsep KTSP yaitu sebuah pembelajaran yang diarahkan kepada siswa didik untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Maka saya dan para guru bekerjasama merumuskan program kerja mulai dari proses belajar, bahan praktek yang dibutuhkan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk diajukan dalam waktu per semester, harapan saya benar-benar siswa memperoleh standar kompetensi yang dibutuhkan ” (Toh)

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan kerjasama semua komponen sekolah yang berkepentingan dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk mengambil langkah tepat.

Dalam implementasinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan silabus dalam arti untuk memperdalam, memperkaya dan memodifikasi tetapi masih dalam koridor isi kurikulum secara nasional kemudian pada satuan pendidikan disebut KTSP. Tertuang dalam PP no. 19 tahun 2005 KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing masing satuan pendidikan.

Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan berdasarkan faktor pengembangan kurikulum, psikologi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2.4. Kebijakan Kepala Sekolah Pada Siswa

Kebijakan kepala sekolah terhadap peserta didik, mulai dari proses penerimaan siswa baru, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional. Pada pembinaan dengan sasaran akhir perkembangan siswa yang optimal, sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas perkembangan, kebutuhan, bakat, minat, dan kreativitasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 menyebutkan siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kebijakan kepala sekolah akan membagi tugas dengan para wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Berikut petikan wawancara dengan informan Jam dan informan Kus.

“Karena disini Bapak dibantu oleh 3 Wakasek, yaitu diantaranya ada Wasakes bidang kurikulum, Wakasek bidang kesiswaan, dan Wakasek sarana prasarana, maka secara penuh untuk urusan siswa Bapak percayakan kepada Bapak Edi selaku Wakasek kesiswaan karena lebih kepada kedisiplinan siswa, OSIS dan kegiatan ekstra kurikuler, ya paling Bapak mengevaluasi, dan memfasilitasi saja untuk kegiatan dan program rencana kegiatan yang dibuat oleh koordinator masing-masing pembina ekstrakurikuler”. (Jam)

”Bidang kesiswaan akan ditangani langsung oleh Wakasek kesiswaan jadi berbagi tugas dengan para wakil saya dengan jumlah siswa yang sudah lumayan tidak mungkin saya bisa bertanggungjawab penuh tanpa bantuan mereka saya tidak bisa, yang sudah dilakukan oleh wakilsaya bidang kesiswaan diantaranya kerjasama dengan pihak kepolisian misalnya dengan pencegahan Narkoba dan tawuran antar pelajar dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada saat MOS (Masa Orientasi Siswa) murid baru berlangsung”. (Kus)

Untuk masalah kesiswaan ini lebih menangani pada kedisiplinan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran dan pengembangan diri yang dikemas dalam program kegiatan ekstrakurikuler yang ditangani oleh wakil bidang kesiswaan dibantu guru pembina pengembangan diri yang bersifat rekreatif berdasarkan program dari wakil bidang kurikulum, pada pelaksanaannya wakil kesiswaan selain dibantu guru pembina pengembangan diri akan dibantu petugas kedisiplinan. Seperti dikatakan informan Kam.

”Kesiswaan biasanya saya akan lebih meningkatkan disiplin karena dengan disiplin saya mengharapkan bisa mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang maju dan sukses, misalnya cara berpakaian, bersepatu, dan datang tepat waktu dan tugas ini saya serahkan kepada guru piket dan anggota OSIS yang ditunjuk menjadi petugas PKS (Petugas Keamanan Sekolah) secara bergiliran melaksanakan tugasnya bersama guru piket termasuk yang memberi laporan ketika ada siswa yang membolos”.
(Kam)

Fungsi dan tujuan akhir pembinaan kesiswaan secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan akhir dari pengembangan siswa adalah mengembangkan potensi pada siswa untuk lebih kreatif dan mandiri, selain siswa mendapatkan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas juga didukung dengan kegiatan yang mendukung pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

dilaksanakan diluar jam belajar, dan kegiatan tersebut sangat beragam tergantung kepada potensi pembina yang ada pada satuan pendidikan. Seperti pada satuan pendidikan tempat informan Mah, dan Ern.

”Bidang kesiswaan itu meliputi pembinaan ketaqwaan, kepribadian, dan kreatifitas. Seperti pembinaan keimanan dan ketaqwaan dengan diimplementasikan selain dalam pelajaran yang diberikan di kelas juga ditunjang dengan kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler, ada keagamaan seperti dengan Dakwah, olahraga bola volly, sepak bola, karena mayoritas murid disini lelaki jadi bola volly dan sepak bola yang banyak diminati bahkan kemaren waktu ada turnamen tingkat Kabupaten anak-anak yang terpilih untuk mewakili SMK, saya selaku pimpinan disini tinggal berkoordinasi dengan para Wakasek saja”. (Mah)

”Masalah Siswa ya! Untuk masalah kedisiplinan kami tidak terlalu repot karena kebanyakan muridnya perempuan, jadi cenderung lebih mudah untuk diatur ketimbang yang laki-laki, dan untuk kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali, untuk ini akan ditangani oleh wakasek kesiswaan”. (Ern)

Sebagai Kepala Sekolah dalam mengambil kebijakan, dengan berbagi tugas kepada wakilnya dalam bidang kesiswaan untuk merencanakan dan merancang sebuah kedisiplinan dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk kepribadian, menggali minat dan bakat siswa yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut, selain itu juga wakil bidang kesiswaan akan dibantu oleh anggota OSIS. Dan dua kepala sekolah lebih menegakkan kedisiplinan dengan bekerjasama sama dengan pihak lain, seperti dengan dinas kepolisian setempat dengan pertimbangan lokasi sekolah rawan dengan tawuran antar sekolah dan dekat dengan akses pusat perbelanjaan.

”Kalau untuk peminat yang terbanyak itu kegiatan olah raga seperti sepak takraw, bahkan waktu istirahat selalu digunakan anak-anak untuk bermain dan untuk memotivasi mereka sekali waktu saya tandingan dengan para dewan Guru jadi agar lebih bersemangat dan menyenangkan dan mereka sangat antusias sekali”. (Lin)

”Banyak minat anak-anak itu kepada olahraga Beladiri pencak silat mungkin juga karena banyak yang laki ya, tetapi diminati juga kok oleh anak perempuan, saat ini kegiatan pengembangan diri selain olah raga pencak silat, ada pula bulutangkis, futsal, sepakbola, ada juga rohis, pramuka dan PMR. Kendalanya dari anak-anak itu kegiatannya sangat padat mereka belajar dari hari senin sampai dengan hari sabtu masuk pukul 07.00 pulang pukul 14.00 dan ditambah jam praktek karena bergiliran

tempatnyanya. Untuk masalah kedisiplinan mereka gampang diarahkan, selain itu Bapak menempatkan dua satpam yang bergiliran menjaga pintu gerbang depan dan yang satu berjaga pada bagian belakang gedung, karena menurut pengamatan saya lingkungan sekolah ini sangat rawan dekat dengan mall dan jalan raya maka untuk tingkat keamanan menjadi perhatian Bapak”. (Toh)

Siswa merupakan subyek utama dalam pendidikan seorang guru akan dikatakan berhasil apabila dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dapat merubah siswa, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan kepribadian, selain itu juga, siswa SMK juga harus dididik lebih disiplin, mandiri, dan dewasa, sehingga diharapkan selepas dari sekolah siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya pada saat di bangku sekolah, dan siap bersaing di dunia kerja.

Seorang Kepala Sekolah tidak dapat sepenuhnya menjalankan kebijakan sendiri, pengelolaan siswa mulai dari penerimaan, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, sampai memasuki dunia kerja, maka akan berkoordinasi dengan Wakasek bidang kesiswaan, yang bertugas merencanakan serta mengkoordinasikan tentang program penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, sebagai bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah.

4.2.5. Kebijakan Kepala Sekolah Pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Guru merupakan ujung tombak pada sebuah satuan pendidikan, yang berkomunikasi langsung dengan siswa dan harus memiliki kompetensi dalam melakukan proses belajar yang didukung oleh staf yang membantu kelancaran kegiatan administrasinya.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan mengatur ketentuan kompetensi, hak dan kewajiban pendidik.

Seperti dikatakan informan Jam bahwa pendidik dan tenaga pendidik berhak mendapatkan peningkatan kompetensi atau keterampilan dengan melalui pendidikan formal, seminar dan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi mereka, dan berusaha pada setiap tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada mereka.

”Kalau masalah guru sich Bapak tidak masalah, karena semua keputusan untuk guru dan staf Tu itu sudah merupakan kewenangan Departemen Pendidikan Setempat, dan Bapak hanya menerima saja, yang Bapak lakukan sekarang adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan guru, karena sekolah tanpa guru bagaimana sekolah bisa berjalan, coba Ibu bayangkan. Maka dari itu saya selalu meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun tidak seberapa besarnya tapi setiap tahun anggaran saya tingkatkan, seribu rupiah tidak besar tetapi itu sudah merupakan kebijakan saya. Selain mereka mendapatkan gaji dari pemerintah, mereka juga akan memperoleh honor dengan kelebihan jam ini yang Bapak maksudkan, dan dana ini berasal dari Komite termasuk menggaji guru honor, kalau untuk guru honor Bapak masih memerlukan, karena jarang sekali mendapatkan kiriman guru dari teknik sementara di sekolah Bapak semua program berkaitan dengan teknik”. (Jam)

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan guru SMKN, seorang kepala satuan pendidikan tidak banyak melakukan perekrutan guru dan staf karena sebagian besar sudah didroping dari pemerintah, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah diantaranya pertama, untuk kebutuhan guru, ada tiga informan merekrut guru honor untuk menutupi kekurangan jumlah guru dengan memberikan honor sesuai dengan kemampuan sekolah, adapun dananya berasal dari Komite, semua kepala sekolah akan memberikan honor untuk kelebihan jam, dari jam wajib guru PNS, dan memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti diklat atau pelatihan dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan dua kepala sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru.

Seperti diungkapkan oleh informan Mah bahwa dengan memberikan kesempatan kepada guru mengadakan musyawarah dengan guru bidang studi yang berada pada wilayahnya akan meningkatkan kompetensi yang mereka harapkan.

”Sebenarnya SMKN ini masih banyak memerlukan PNS guru terutama untuk program Administrasi, Ibu aja atuh mutasi kesini?..... Makanya masih banyak guru honor disini dan untuk guru honor tidak dibuat standar gaji, misalnya UMR tetapi akan disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Dan untuk meningkatkan kompetensi guru, akan saya ikutkan dengan adanya pelatihan-pelatihan, semua mata pelajaran baik itu mata pelajaran Normatif, Adaptif maupun Produktif, baik untuk tingkat kabupaten maupun propinsi. Untuk tingkat rayon sudah dibentuk MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan tempat itu merupakan wadah yang tepat kepada guru untuk saling berdiskusi bagaimana mempersiapkan rencana pelajaran, media yang digunakan sekaligus berbagi pengalaman dengan sekolahnya masing-masing”. (Mah)

”Guru dan Staf tata usaha memang ini sebuah paket yang saling mengisi dan saling berkaitan, guru dapat bekerja dengan lancar dan bisa mengajar dengan baik dalam menyelesaikan tugas administrasinya akan dibantu oleh petugas tata usaha, begitu pula sebaliknya petugas tata usaha tidak akan bisa bekerja dan tidak ada pekerjaan kalau tidak ada kebutuhan guru, keduanya saling mendukung dan saya selaku Kepala Sekolah juga akan meningkatkan kesejahteraannya, bahkan ada seorang guru yang tanpa lelah dan bosan membimbing anak-anak sampai tidurpun disekolah, maklum masih muda juga kali”. (Kam)

”Bapak akan memberikan honor tambahan apabila ada kelebihan jam mengajar. Untuk kewajiban guru PNS itu jam wajib mengajar 20 jam ini yang menggaji pemerintah dan untuk kelebihannya itu dibayarkan dari Komite. Misalnya guru PNS mengajar 28 jam maka penghitungannya 20 jam dibayar oleh pemerintah dan yang kelebihan 8 jam dianggap guru honor dan besarnya akan disesuaikan dengan kesepakatan sekolah dan Komite yang jelas Bapak selalu berharap Komite untuk meningkatkan kesejahteraan guru, karena merekalah kunci keberhasilan belajar siswa”. (Toh)

Kebijakan berikutnya yang dilakukan kepala sekolah terhadap staf tata usahanya, informan Kus mengatakan untuk mengatasi kekurangan tenaga tata usaha dengan merekrut alumni siswanya yang berprestasi dan santun, dan dua kepala sekolah yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan stafnya, dan untuk mengambil langkah efisien kepala satuan pendidikan dalam mengatasi kekurangan guru dengan merekrut guru honor yang kompeten dibidang yang dibutuhkan.

”Untuk kebutuhan guru tidak ada masalah dan masih mencukupi dan untuk regenerasi petugas Tata Usaha, saya merekrut alumni yang berprestasi dan memiliki kesantunan untuk membantu saya menjadi staf walaupun masih honor, dengan tujuan bisa mengurangi pengangguran dan akan menjadi batu pijakan mereka sebelum mereka mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Sama untuk semua SMK dalam meningkatkan kompetensi guru dengan memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan”. (Kus)

”Kebijakan guru dan staf untuk saat ini saya memperdayaka guru yang ada terlebih dahulu karena memang masih bergabung dengan SMA jadi secara tegas tidak bisa dikotak-kotak mana guru SMA dan guru SMK, dan menunggu perkembangan tahun berikutnya dari dinas kabupaten untuk menempatkan guru yang benar-benar kompeten disini, dan saat ini masih

mempunyai 5 guru yang PNS masih mencukupi untuk tahun ajaran sekarang, dan saya optimis untuk tahun depan banyak orangtua yang akan menyekolahkan anaknya disini, sebelum mendapatkan guru PNS saya akan bekerjasama dengan guru SMA untuk bisa bekerjasama dengan kami”. (Lin)

”Alhamdulillah untuk pegawai dan guru tidak mengalami hambatan sama sekali pada saat mulai berdiri sudah banyak guru PNS yang ditempatkan disini termasuk untuk staf tata usaha, yang PNS ada satu dan dibantu oleh 2 orang tenaga honorer. Kalau untuk tenaga pendidik sudah sangat pas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan hanya saja untuk program Teknik Komputer dan Jaringan dibantu oleh 2 guru honorer dari sarjana IT, karena belum ditempatkan guru PNS untuk teknik komputer dan jaringan. Untuk honorarium bersumber dari SPP anak-anak. (Ern)

Sudah merupakan kewajiban seorang kepala sekolah dalam mengatur guru dan staf Tata Usaha, dengan memberikan motivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar agar memenuhi standar kompetensi yang diinginkan, seperti tertuang dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selain itu kepala sekolah harus menumbuhkan disiplin, motivasi, dan memberikan penghargaan kepada guru dan staf dengan memberikan honor kelebihan jam mengajar, hal ini akan memotivasi guru dan staf dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Guru dan staf merupakan bagian dari komponen pendidikan yang sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Seorang guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kepala Sekolah selaku pimpinan dengan kebijakkannya harus mampu menganalisis kebutuhan, merencanakan, rekrutment, pembinaan, sekaligus memberikan kesejahteraan, hadiah, sanksi kepada guru dan staf secara tepat, sehingga secara bersama dapat mencapai visi misi sekolah yang diharapkan.

4.3. Pendapat Kepala Sekolah pada Perpustakaan.

Perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide-ide agar siswa bisa eksis di dalam masyarakat yang berbasis informasi dan teknologi, seperti yang terjadi sekarang ini. Perpustakaan sekolah membekali siswa dengan keterampilan

belajar seumur hidup (*life long learning education*) dan membangun imajinasi, mempersiapkan siswa agar bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Sudah seharusnya kepala sekolah memberikan perhatian terhadap perpustakaan sekolah dengan adanya otonomi dalam satuan pendidikan maka perpustakaan lebih dikaitkan dengan perkembangan pendidikan yang bisa diintegrasikan dengan kurikulum sekolah.

Kepala sekolah menyadari pentingnya perpustakaan untuk mendukung program pendidikan, sudah tentu perhatian kepada perkembangan perpustakaan diprioritaskan, baik dari segi alokasi dana, tenaga, koleksi maupun ruangan perpustakaan.

4.3.1. Pendapat Kepala Sekolah Pada Ruang Perpustakaan

Pendapat kepala sekolah terhadap ruang perpustakaan dengan menciptakan ruang perpustakaan sekolah yang baik sebagai wadah belajar peserta didik. *Opinion is a notion or conviction founded on probable evidence*. Dapat diartikan opini adalah dugaan atau pendirian yang didasarkan pada kemungkinan fakta yang ada. (Kamus online).

Prasarana perpustakaan harus menyenangkan, wadah semua kegiatan, disesuaikan usia pemustaka, nyaman, memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, tidak harus mewah, dan milik bersama. Bagi pemustaka, dengan tersedianya prasarana, ada rasa nyaman dan menyenangkan di perpustakaan dan minimal untuk sarana prasarana perpustakaan sekolah harus mempertimbangkan faktor usia, dengan suasana yang menyenangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekolah.

Hasil wawancara dengan informan Jam dan informan Mah, dengan keadaan perpustakaan masing-masing, berikut petikkan wawancaranya.

“Kebetulan Bapak akan menyiapkan perpustakaan menjadi *digital library* ya, karena sekolah ini sudah berstandar nasional dan akan menuju sekolah berstandar internasional”. (Jam)

“Sekarang sedang dalam proses perubahan, perabot yang ada akan diganti dengan perabot yang baru dan untuk segala perubahannya saya serahkan kepada Kepala Perpustakaan yang baru. Yang pasti perpustakaan dalam pembenahan dan menuju proses *digital library*, karpet ini nanti tidak dipakai lagi, rak buku juga diganti dan sedang dipesan, pokoknya semua akan saya

ganti, dan itu anak-anak sedang memilih buku-buku yang sudah kadaluwarsa, akan saya berikan koleksi yang lama kepada siapa nanti yang membutuhkan”. (Kep. 2)

Kemudian peneliti lebih jauh menanyakan bagaimana dengan sarana prasarana yang ada diperoleh jawaban dari Jam bahwa perpustakaanya sedang menuju perpustakaan *digital*.

“Coba nanti lihat saja sendiri, takutnya mengada-ada, bahwa perpustakaan sudah dilengkapi akses internet (wifi) jadi nanti siswa kalau ingin mencari buku tinggal klik saja, kebetulan Bu Imas (Kepala Perpustakaan) itu sangat inovatif. Bapak pasang juga infokus di perpustakaan, jadi agar guru dapat memanfaatkannya, bisa membawa anak muridnya ke perpustakaan untuk belajar boleh juga untuk menonton film, asalkan filmnya yang bersifat mendidik seperti, laskar pelangi, atau yang lainnya, bisa juga untuk pelajaran IPA pokoknya terserah saja kepada Bapak/Ibu guru yang ingin menggunakan fasilitas itu silahkan saja, juga Bapak berikan sebuah komputer dan scanner”. (Jam)

Konsep perpustakaan digital menurut informan Jam koleksi buku dialihbentuk dengan cara dicsan, melengkapi perpustakaan dengan akses internet. Dari dua informan diatas dapat disimpulkan pendapat mereka terhadap ruang perpustakaan akan berbeda menyebutkan perpustakaan digital dengan ruangan yang dilengkapi akses internet.

Kemudian wawancara dilanjutkan pada informan yang disekolahnya belum menyelenggarakan perpustakaan.

“Ruang perpustakaan ya! Belum atuh, untuk ruang praktek saja belum punya bagaimana akan membangun perpustakaan. Ruang praktek bahkan lebih penting daripada perpustakaan. Bagaimana anak akan trampil sementara belum ada tempat prakteknya”. (Lin)

“Belum punya, khan sudah Bapak katakan tadi, bagaimana mau dibangun perpustakaan, sekarang saja baru bisa memboyong sebagian murid untuk pindah dari Jambe, untuk kepindahan saja belum teratasi semua, dan belum bisa berkumpul semua. Ini saja masih menunggu kapan bantuan turun, maunya minta kepada pemerintah agar ruang kelas baru cepat teralisasi juga pemagaran. Ya itu tadi karena kita ini masih baru khan, bagaimana mau membangun perpustakaan, mau diletakkan disana (SMP) tidak mungkin karena masih numpang, mau membangun disini, mungkin pemagaran dulu karena kurang aman. Dan semua itu harus dibicarakan terlebih dahulu”. (Kus)

Dari jawaban informan Lin sekolah belum memiliki perpustakaan karena prioritas dari sekolah Lin adalah ruang praktek karena dianggap ruang praktek

lebih penting dibandingkan dengan ruang perpustakaan. Informan Kus belum menyelenggarakan perpustakaan karena untuk kebutuhan ruang kelas saja masih kurang termasuk kebutuhan pemagaran untuk keamanan sekolah, memang untuk sekolah Kejuruan ruang praktek mendukung langsung dengan kompetensi yang harus dimiliki murid sebagai bekal mencari pekerjaan.

Dikatakan juga oleh informan Kam tidak bisa menyelenggarakan ruang perpustakaan sekolah karena masih banyak kebutuhan ruangan. Berikut hasil wawancaranya.

“Sementara belum ada, karena sekolah ini masih tergolong baru khan, untuk ruang yang sangat penting saja belum punya, seperti ruang Kepsek belum ada, ruang guru juga belum bahkan ruang kelas juga masih kurang. Sekarang ini masih tergantung dengan SMP dalam masalah pemakaian ruangan, kalau memang tidak dipergunakan oleh SMP maka bisa kami gunakan, namanya juga numpang kita harus ngalah”. (Kam)

Peneliti menanyakan kembali apakah tidak mengajukan bantuan kepada pemerintah, dijawab sudah sering mengajukan dan mengusulkan agar mendapatkan bantuan untuk perpustakaan, tetapi hasilnya sampai saat ini nihil. Inilah jawaban dari informan Kam.

“Wah sering !!! kami sudah mengajukan bantuan, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah tingkat daerah, tapi sampai sekarang belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan untuk perpustakaan”. (Kam)

Dikatakan oleh informan Ern tidak dilakukan kebijakan pada ruang perpustakaan karena bukan kepala sekolah menjabat tetap hanya mengatsi sementara menunggu kepala sekolah yang tetap.

“Saat ini belum ya, tetapi tidak tahu bagaimana nanti dengan Kepsek yang baru, semoga saja bisa diadakan. Bahkan kalau menurut saya itu, ruang atau bangunan perpustakaan itu harus berada ditengah-tengah gedung biar nanti semua warga sekolah tidak repot-repot ke perpustakaan, karena menurut Ibu ma memang perpustakaan itu penting sekali jadi sebenarnya memang harus ada”. (Ern)

Diperoleh jawaban yang sama dari informan Toh di sekolahnya belum diselenggarakan perpustakaan sekolah tetapi akan berupaya untuk mewujudkan ruang perpustakaan dalam menghadapi akreditasi sekolah, dengan menggunakan ruang praktek perhotelan.

“Belum memiliki, tapi untuk tahun ini akan saya usahakan perpustakaan itu harus ada walaupun hanya sementara, karena untuk tahun ini sekolah akan

diakreditasi ya mau tidak mau akan menggunakan ruang praktek perhotelan menjadi perpustakaan sementara. Dan berikutnya akan saya programkan direncana pengembangan sekolah”. (Toh)

Tidak selayaknya perpustakaan diwujudkan dengan alasan untuk menghadapi penilaian akreditasi, kemudian apabila selesai akreditasi selesai pula ruang perpustakaan karena ruangnya beralih fungsi lagi menjadi ruang praktek perhotelan. Jadi perpustakaan diwujudkan hanya untuk mengejar target nilai tertentu saja dengan mengabaikan fungsi dan peran perpustakaan yang sebenarnya.

Tetapi ada niat baik dari informan Toh setelah ditanyakan rencana ruang perpustakaan dalam jangka panjang dikatkan untuk memperkaya koleksi akan meminta bantuan baik kepada instansi pemerintah maupun kepada pihak swasta selaku rekan MOU. Karena siswa SMK harus melakukan kerja magang di instansi pemerintah dan swasta sebagai pengalaman dan tuntutan kurikulum.

“Rencananya kami akan bekerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan perpustakaan. Dan saat ini sekolah kami masih perlu ruang praktek”. (Toh)

Dapat disimpulkan delapan dari informan , dua informan mengatakan sedang merealisasikan perpustakaan digital dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan peralatan elektronik dan perabot yang memadai, dan sudah merintis perpustakaan digital, memasang jaringan internet dengan fasilitas wifi, dan untuk memberdayakan perpustakaan dengan memasang infokus yang digunakan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di perpustakaan, untuk informan Mah sedang menuju perpustakaan digital dengan melakukan *revitalisasi* dengan penggantian semua sarana yang ada, dan mengentri data jumlah buku dengan fasilitas komputer, memilah buku yang masih layak untuk disecan.

Selebihnya enam SMKN belum memiliki ruang perpustakaan dengan berbagai alasan diantaranya, baru berdiri, ada dua SMKN masih bergabung dengan SMPN, dan tiga SMKN baru berdiri, satu sekolah masih menunggu kepala sekolah yang berdinast tetap.

Tetapi ada kebijakan kepala sekolah pada ruang perpustakaan, diantaranya dua informan akan memprogramkan dalam rencana pembangunan pada tahun ajaran berikutnya, dan satu informan dengan rajin mengajukan bantuan walaupun

sampai saat ini belum turun, dan satu informan akan melengkapi koleksinya dengan bekerjasama dengan pihak lain baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.

Diharapkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh informan akan mewujudkan perpustakaan sekolah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran, dan bukan menjadi pelengkap saja bagi satuan pendidikan atau alat untuk akreditasi.

4.3.2. Pendapat Kepala Sekolah Terhadap Koleksi Perpustakaan

Pendapat kepala sekolah pada koleksi perpustakaan harus memenuhi kebutuhan masyarakat sekolahnya. Seperti dituangkan dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 menyebutkan koleksi perpustakaan terdiri dari buku teks pelajaran (buku Pelajaran), buku panduan pendidik, buku pengayaan (buku non fiksi dan fiksi), buku referensi (kamus, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, buku Undang Undang, peraturan, kitab suci) dan sumber bacaan yang lain (majalah, surat kabar, globe, peta, CD/bahan elektronik yang lain).

Koleksi merupakan bagian komponen yang terpenting di dalam perpustakaan, bisa berupa buku baik buku pelajaran atau buku penunjang, buku referensi, baik tercetak atau tidak tercetak, dan bisa juga dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Dikatakan informan Jam dan informan Mah tentang kebijakannya pada koleksi. Bahwa di perpustakaan Jam setiap tahun koleksinya meningkat dan mewajibkan kepada siswa-siswinya yang lulus untuk memberikan sumbangan selain itu untuk buku paket mendapat bantuan dari pemerintah. Terkait dengan koleksi, informan menguraikan sebagai berikut.

“Untuk koleksi selalu ada peningkatan pertahunnya, sekarang sudah ada kurang lebih 750 judul dengan jumlah buku 13.102 eksemplar (didampingi kepala perpustakaan). Untuk koleksi Bapak wajibkan bagi anak-anak yang lulus untuk menyumbangkan buku, silahkan saja lihat ke perpustakaan. Ni seperti ini yang ada didalam kardus itu buku-buku yang didrop dari pusat kebetulan saja belum dibawa ke perpustakaan masih ada diruangan saya dan saat ini berapa jumlah koleksinya Bapak tidak tahu secara pastinya, tanyakan saja langsung ke B. Imas”. (Jam)

“Koleksi perpustakaan berjumlah 2059 buku, dan untuk judul belu diketahuisepenuhnya saya serahkan langsung kepada Kepala Perpustakaan ya, karena terus terang saja bukan bidang saya, dan sudah berapa tahun perpustakaan tidak diurus dan terbengkelai, dan sepertinya belum diinventaris, dan sedang dalam pengurusan, kalau dulu pernah dapat sumbangan dari komite untuk koleksi, tadi Ibu lihat sendiri khan ada anak-anak yang sedang memilah-milah buku, dan kalau memang nanti oleh beliau mengusulkan untuk pembelian buku ya saya harus siap”. (Mah)

Menurut informan Mah untuk mengatasi koleksi perpustakaan sepenuhnya diserahkan kepada kepala perpustakaan dan dikatakan sedang dalam membenahan menuju perpustakaan *digital*.

Diambil kebijakan bagi informan Jam terhadap koleksi perpustakaan, selain mendapat bantuan dari pusat berupa buku paket, untuk menambah koleksi dengan mewajibkan kepada siswa yang lulus untuk menyumbangkan buku dengan tidak menentukan subyeknya dan tahun terbitnya. Untuk informan Mah untuk koleksi dipercayakan kepada kepala perpustakaan dan menurut informasi dari wakasek sarana prasarana pernah mendapatkan bantuan untuk menambah koleksi selain dari pemerintah juga dari komite sekolah.

Koleksi perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan tahun 2009 bahwa perpustakaan sekolah harus mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar dan dalam meningkatkan minat baca pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku, dan koleksi buku ditambah per tahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi. Dan diwajibkan pula perpustakaan sekolah memiliki koleksi buku teks pelajaran, karena berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan seperti diatur dalam Permendiknas No. 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran. Dan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan guru.

Selanjutnya diperoleh informasi dari informan Lin, Kus dan informan Ern bahwa di sekolahnya belum memiliki koleksi perpustakaan karena belum memiliki ruang perpustakaan. Berikut hasil wawancara.

“Gak ada, walaupun ada akan diletakkan dimana”. (Lin)

“Khan belum ada ruangnya, makanya anak-anak saya sarankan ke internet saja”. (Kus)

“Belum ada satupun, mungkin ya buku pegangan yang digunakan oleh Bapak/Ibu guru itu merupakan koleksi perpustakaan”. (Ern)

“Ruangnya saja belum ada, tapi saya akan usahakan untuk koleksi akan bekerjasama dengan berbagai pihak bisa dengan penerbit, dengan pihak swasta selaku rekan kita prakerin yang ada disekitar kita, na ide ini muncul karena pertanyaan dari Ibu, insyaallohlah akan kami usahakan”. (Toh)

“Kalaupun ada buku di simpan di ruang TU, sebagian ada di ruang Guru, kalau ada anak yang membutuhkan ya ambil. seperti itu diletakkan di lemarnya TU, kalau ada siswa yang membutuhkan ya ambil gitu aja”. (Kam)

Dua informan yang tidak memiliki koleksi perpustakaan, dan belum ada upaya untuk mewujudkan koleksi perpustakaan, informan Ern ada yang mengatakan bahwa koleksi perpustakaan itu buku pegangan guru karena dibelikan oleh sekolah, informan Kam mengatakan mendapatkan bantuan koleksi dari pusat berupa buku paket, karena belum punya ruangnya maka disimpan di ruang tata usaha dan disimpan di ruang guru, informan Toh belum punya koleksi perpustakaan tetapi akan berupaya bekerjasama dengan penerbit dan perusahaan selaku mitra prakerin (praktek kerja industri).

Dari koleksi yang ada pada informan Jam dan informan Mah belum memenuhi rasio informasi yang dibutuhkan dan belum ada pengelolaan koleksi dengan baik, terlihat pada saat observasi di perpustakaan, koleksinya hanya terdiri dari buku paket dan ada beberapa majalah hidayah yang tahun terbitnya sudah lama, tidak ditemukan sumber informasi lain misalnya buku pengayaan, buku rujukan, kamus ensiklopedi, peta, globe dan sumber elektronik.

Dengan menyediakan koleksi yang memenuhi kebutuhan informasi untuk siswa SMK, para guru dan anggota yang lain akan memperoleh kesempatan dan memperdalam pengetahuan. Dan koleksi perpustakaan sekolah harus selalu dikembangkan sesuai tuntutan kurikulum serta merujuk pada prinsip pengembangan koleksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kemuktahiran sumber informasi.

4.3.3. Pendapat Kepala Sekolah Terhadap SDM Perpustakaan

Pendapat kepala sekolah pada sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah adalah guru atau pegawai yang diberi tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah. (Perpustakaan Nasional, 2000).

Berikut petikan hasil wawancara peneliti dengan informan Jam dan informan Mah.

”Saya menunjuk Bu Imas untuk menjadi Kepala Perpustakaan, karena beliau itu sangat inovatif dan kreatif, selain itu juga dulunya Wakasek kurikulum. Jadi Bapak mengharap dengan beliau saya tunjuk menjadi pimpinan perpustakaan dapat mewujudkan perpustakaan yang digital”. (Jam)

”Sudah tiga tahun ini perpustakaan tidak terurus, petugas yang terdahulu sudah pindah kerja, makanya untuk sekarang Bapak menunjuk Pak Jamalus karena beliau itu pakar perpustakaan dan sudah berkecimpung di dunia perpustakaan sudah cukup lama, maka saya berharap dengan hadirnya beliau di perpustakaan, dapat mengembangkan perpustakaan untuk anak-anak juga guru”. (Mah)

Dapat disimpulkan untuk sekolah yang sudah memiliki perpustakaan, informan Jam menunjuk satu orang petugas sebagai kepala perpustakaan yaitu seorang guru dengan kualifikasi, mantan wakil bidang kurikulum dan yang menurut informan kreatif dan inovatif, kemudian untuk informan Mah menunjuk kepala perpustakaan, kepada guru yang berkompeten dibidangnya dan sudah lama berpengalaman dibidang perpustakaan, juga seorang yang aktif dalam kepengurusan organisasi bidang perpustakaan tingkat kabupaten dan propensi.

Kualifikasi kepala perpustakaan sekolah melalui jalur guru minimal diploma empat dengan kompetensi ilmu perpustakaan dengan masa kerja 3 tahun (Permendiknas, nomor 25 tahun 2008)

Hasil wawancara peneliti dengan sekolah yang tidak menyelenggarakan perpustakaan, seandainya nanti sekolah menyelenggarakan perpustakaan kebijakan kepala sekolah pada SDM perpustakaan yang ditunjuk menjadi kepala perpustakaan dengan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.

”Yang pasti guru disini dan yang seperti apa, itu nanti sajalah”. (Lin)

”Bisa petugas Tata Usaha, disini khan banyak petugas TU nya dan banyak luang waktu, dan juga bukunya ada di ruang TU”. (Kus)

”Belum, belum ada”. (Kam)

”Mungkin Bapak akan tunjuk Pak Yono tata usaha, karena beliau itu orang IT dan ide-idenya yang menginspirasi Bapak untuk kemajuan sekolah ini, beliau itu pegawai Tata Usaha yang pertama disini, karena harapan saya perpustakaan yang sudah modern”. (Toh)

Diketahui dari informan Lin, kebijakan yang diambil pada SDM perpustakaan sekolah secara jelas belum bisa ditentukan yang jelas pegawai tersebut masih mengabdikan di sekolah tersebut. Dan informasi Kus beda lagi akan menunjuk petugas tata usaha dengan pertimbangan staf tidak banyak pekerjaan dan banyak memiliki waktu. Untuk informan Kam tidak bisa menjawab dengan andai-andai karena memang pada kenyataannya belum ada perpustakaan. Berbeda pula pendapat informan Toh yang ingin merencanakan pembangunan perpustakaan pada tahun mendatang sudah memiliki kriteria yang dipilih menjadi kepala perpustakaan yaitu pak Yono yang menurut kepala sekolah memiliki kompetensi di bidang IT karena direncanakan perpustakaan yang berbasis teknologi.

Kritikan datang dari informan Ern karena informan ini seorang pengawas di tingkat kabupaten sedikit banyak mengetahui permasalahan mengapa selama ini di kabupaten Tangerang belum pernah merekrut PNS pustakawan sekolah. Berikut pendapatnya.

”Ya itulah sebenarnya ini kelemahan kita selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten belum pernah membuka lowongan PNS untuk tenaga perpustakaan, jadi kalau segala sesuatu tidak ditangani oleh yang kompeten, pasti hasilnya kurang maksimal”. (Ern)

Dengan menempatkan tenaga perpustakaan yang tepat pemberdayaan fungsi perpustakaan akan sangat efektif mencapai tujuan yang diharapkan, seperti yang sudah dilakukan oleh informan Mah dengan menunjuk orang yang berkompeten dibidangnya, pendapat informan yang lain bahwa tenaga pustakawan masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, dengan memanfaatkan tenaga tata usaha.

Pustakawan sekolah adalah staf yang profesional dan berkualitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah, yang didukung oleh seluruh warga sekolah dengan bekerjasama, maka akan benar-benar bisa memanfaatkan perpustakaan. Seperti tertuang dalam Permendiknas no. 25 tahun 2008 yang berisi tentang standar tenaga perpustakaan sekolah.

Dengan adanya pustakawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dapat memberikan layanan yang baik sesuai dengan fungsinya, dan dapat memberdayakan peran perpustakaan untuk masyarakat sekolah, menjadi sangat menarik untuk dikunjungi. Selain itu juga perpustakaan sekolah memerlukan tenaga yang memadai selain jumlah juga kualitas dari tenaga pustakawan.

4.3.4. Pendapat Kepala Sekolah Terhadap Anggaran Perpustakaan.

Masalah anggaran merupakan sebuah keputusan penting yang dilakukan oleh kepala Sekolah yang akan merealisasikan tujuan sekolah yang ditunjang sarana dan prasarana perpustakaan. Sebuah kebijakan didasari pengetahuan, pengalaman, kepedulian seorang Kepala Sekolah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan sekolah terutama yang menyangkut anggaran harus menggunakan skala prioritas. Diperoleh informasi kebijakan kepala sekolah pada anggaran perpustakaan sebagai berikut.

”Kalau Bapak sich akan memberikan perhatian sarana prasarana perpustakaan yang sekiranya menunjang keberhasilan siswa ya, jadi apapun nanti anggaran yang diajukan oleh Bu Imas insyaallah akan Bapak penuhi. Dan memang perpustakaan juga yang menunjang kualitas sekolah, kalau secara khusus belum diatur”. (Jam)

”Mungkin nanti anggaran untuk kebutuhan perpustakaan bisa sangat besar, karena banyak sekali yang harus dilengkapi semua isi dari perpustakaan akan diganti semua, mulai dari perabot, koleksi, peralatan IT nya, jadi saya sesuaikan saja tidak harus mengkotak-kotak”. (Mah)

Berdasarkan UU No 43 tahun 2007 Bab X pasal 39 dikatakan sumber dana perpustakaan yang pertama berasal dari sekolah yang bersangkutan dengan mengalokasikan 5% dari anggaran belanja operasional sekolah, dan sumber dana berikutnya berasal dari APBN dan APBD, dilanjutkan penjelasan dalam pasal 40 anggaran perpustakaan didasarkan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan, atau bisa juga sumber dana perpustakaan berasal dari sumbangan masyarakat,

kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri, hasil usaha bersama dan sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dari dua informan Jam dan Mah diatas disimpulkan bahwa belum ada kebijakan pada anggaran perpustakaan sebesar 5% dari anggaran belanja operasional sekolah, jadi dana akan diberikan kepada kepala perpustakaan apabila ada kebutuhan yang diajukan oleh petugas sama juga halnya dengan informan Mah dalam rangka pembenahan perpustakaan menuju digitalisasi belum ada alokasi yang terencana, akan diberikan dana sesuai kebutuhan yang diajukan petugas.

Begitu juga bagi tempat informan Lin, Kus, Kam, Ern, Toh karena belum menyelenggarakan perpustakaan maka tidak ada anggaran untuk perpustakaan sekolah berikut petikan wawancaranya.

”Oh gitu ya, untuk kebutuhan yang pokok saja masih kurang bagaimana!?”.
(Lin)

”Lha kalau dananya turun akan saya utamakan pemagaran dulu, karena kurang aman sekolah, kalau untuk perpustakaan ada dan ternyata tidak aman! Saya ini masih menunggu kapan dananya turun”. (Kus)

”Begini saja kalau kami ini mendapatkan dana yang jumlahnya milyaran semua bisa kami wujudkan seperti yang sudah kami bilang tadi, untuk kepentingan yang terpenting saja belum ada, untuk Kepala Sekolah saja belum punya ruangan, bagaimana akan menjalankan tugasnya dengan baik, ga mungkin dong ke perpustakaan dulu”. (Kam)

”Sepertinya belum mengarah kesana, karena RKB baru selesai dibangun, untuk lapangan upacara juga belum ada, kalau hujan sepatu anak-anak tidak bisa diangkat karena tanah merah jadi lengket sekali. Kasihan anak-anak harus lepas sepatu kalau masuk kelas. Jadi masih terfokus kesana”. (Ern)

”Ya nantinya juga akan mengarah kesana, karena apapun yang terjadi perpustakaan itu penting, karena keadaan saja seperti ini dan nantinya tidak perlu repot-repot menyulap ruangan jadi perpustakaan”. (Toh)

Dengan beberapa alasan mengapa sekolah belum memberikan perhatian terhadap perpustakaan dan masih memprioritaskan pengalokasian dana untuk kebutuhan pokok masing-masing sekolah seperti masih memprioritaskan ruang kelas untuk informan Ern, dan Lin, informan Kus membutuhkan dana untuk pemagaran dalam meningkatkan keamanan, dan informan Kam ingin memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah dan satu sekolah masih kerepotan untuk

mengatasi kebutuhan operasional sekolah. Akhirnya semua sekolah akan berupaya memberikan perhatian dan dukungan terhadap perpustakaan, apabila setelah kebutuhan ruang pokok terpenuhi dan tersedianya dana untuk perpustakaan.

Dari pendapat diatas dapat digambarkan untuk sekolah SMKN masih banyak sekolah yang belum memiliki prasarana yang memadai seperti masih kekurangan ruang kelas sebagai tempat belajar, dan kebutuhan prasarana lain yang dianggap mendesak. Dengan diterimanya dana bantuan dari pemerintah masih diprioritaskan pada kebutuhan ruang kelas dan ruang praktek, dan belum memberikan perhatian terhadap perpustakaan karena perpustakaan bisa diwujudkan apabila semua kebutuhan pokok ruang terpenuhi.

Dengan mengalokasikan dana untuk perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberdayakan fungsi dan manfaat perpustakaan sekolah bagi masyarakat sekolah dengan maksimal.

4.3.5. Pendapat Kepala Sekolah Terhadap Pemanfaatan Perpustakaan

Pendapat pemanfaatan perpustakaan ini menyangkut dengan pemanfaatan koleksi perpustakaan atau bahan pustaka oleh masyarakat sekolah selaku pemakai. Berikut petikan hasil wawancaranya:

”Bisa menggunakan fasilitas yang ada diperpustakaan, khan sudah Bapak pasang internet, ada infokus juga. Dipersilahkan kepada bapak dan ibu guru yang ingin memberikan materi bisa diperpustakaan boleh untuk melihat film yang penting mendidik, dari pada anak jenuh dikelas silahkan diperpustakaan.

Ke perpustakaan, apalagi anak kelas XII sengaja bapak berikan fasilitas laptop satu anak satu dan bisa akses internet yang paling cepat hanya diperpustakaan jadi anak-anak sangat betah kalau diperpustakaan.

Lap top bisa diambil dari lab komputer untuk dibawa ke perpustakaan, ya, mereka bisa dengan leluasa mencari sumber-sumber informasi yang mereka butuhkan”. (Jam)

Informan Jam dalam mengambil kebijakan sudah tepat dengan menghimbau kepada siswanya untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dan menyarankan kepada guru untuk mengajar di perpustakaan karena sudah dipasang infokus juga

untuk mengatasi kejenuhan siswa bisa memutar film pendidikan pada saat istirahat dan film yang bersifat menghibur.

Lain halnya informan Mah, karena perpustakaan dalam pembenahan maka belum bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Berikut hasil wawancaranya.

”Untuk saat ini Bapak belum menyarankan untuk mencari informasi ke perpustakaan, selain perpustakaan masih berantakan juga belum banyak koleksi yang dimiliki, kalau untuk tahun besok semoga saja perpustakaan sudah menggunakan komputer pencariannya, sehingga akan memberikan kemudahan bagi siswa dan guru”. (Mah)

Dalam pemanfaatan perpustakaan diatas dapat disimpulkan bahwa satu kepala sekolah berupaya menyarankan kepada siswa dan guru untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuannya, walaupun terfokus pada penggunaan internet, dan satu kepala sekolah akan melakukan hal yang sama tetapi apabila nanti perpustakaan digital sudah terwujud karena saat ini masih dalam langkah pembenahan menuju perpustakaan digital.

Seperti dikatakan Sutarno (2006: 220) pemanfaatan perpustakaan menyediakan berbagai jenis koleksi dan layanan beserta sarana dan prasarannya yang sesuai, praktis, ekonomis serta memberikan kemudahan kepada pemustaka.

Untuk tempat para informan yang tidak ada perpustakaan menyarankan kepada siswa-siswinya untuk memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Berikut hasil wawancaranya.

”Sekarang semuanya sudah modern, mereka bisa mencari informasi dimana saja dan kapan saja dengan internet”. (Lin)

”Sekarang khan jaman internet, saya sarankan mereka baik guru maupun siswa untuk mencari di internet” (Kus)

”Kenapa kok repot-repot jaman sudah canggih, tinggal klik saja di komputer”. (Ern)

”Sekarang sudah ada internet, dan semua bahan belajar dan bahan ajar bisa didownload di internet:. (Toh)

Dikatakan oleh lima informan untuk mencari informasi yang diperlukan dengan memanfaatkan jasa internet dengan alasan pertama karena belum memiliki ruang perpustakaan, yang kedua sekarang sudah berada di jaman teknologi maju dan semua kebutuhan informasi sudah terjawab dengan klik di internet. Dan yang

terakhir satu informan menyarankan kepada siswa dan gurunya untuk menggunakan koleksi buku paket yang sudah disimpan di ruang guru dan ruang tata usaha dengan waktu kapan saja mereka membutuhkannya. Berikut informasi dari informan Kam.

”Mereka bisa saja kok ambil buku-buku pelajaran di ruang Tata Usaha, kapan saja mereka butuhkan silahkan ambil saja, yang penting ijin terlebih dahulu, kalau tidak, diruang guru juga ada bisa ambil kalau memang diperlukan”. (Kam)

Dengan sebagian besar informan menyarankan memanfaatkan sarana internet dalam mencari sumber informasi bagi siswa dan guru, manfaat internet dibaratkan seperti mata pisau yang memiliki sisi positif dan sisi negatif tergantung si pemakai sendiri dan seharusnya memiliki pemahaman literacy informasi agar dapat memanfaatkan internet dengan tepat dan memberikan manfaat.

Pemanfaatan perpustakaan ini tidak terlepas dari makna bagaimana mencari, menemukan dan menggunakan koleksi di perpustakaan, karena bahan pustaka yang disediakan harus dibaca oleh masyarakat sekolah yang menjadi target pemakainya. Dan koleksi tersebut harus digunakan dan dibaca secara maksimal, untuk itu menyangkut konsep dan strategi layanan, merancang sistem yang tepat agar masyarakat sekolah dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat.

Dengan pemanfaatan perpustakaan, bentuk nyata bahan pustaka apabila digunakan dalam jangka waktu panjang akan berdampak pada pola pikir, cara menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya untuk meningkatkan taraf hidupnya, bahkan dapat berdampak dengan banyaknya masyarakat sekolah menggunakan koleksi di perpustakaan akan semakin berkembang koleksi yang dimiliki karena dapat mengetahui koleksi-koleksi yang dibutuhkan sehingga semakin berkembang dan mutakhir.

4.4. Pendapat Komite Sekolah Terhadap Perpustakaan Sekolah

Peran masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan diperlukan agar kondisi sekolah berada diatas standar minimal dan program peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai. (Juklak sistem pendidikan nasional 2003).

Setiap satuan pendidikan pasti membentuk Komite Sekolah karena berperan sebagai pengontrol kebijakan sekolah juga memberikan saran dan pendapatnya untuk memajukan sekolah baik secara materiil maupun moril. Komite sekolah dibentuk pada setiap satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Peran Komite mencerminkan 4 fungsi pokok pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan perantara /penghubung (*Advisory, Supporting, Controlling, and Mediating*).

Keberhasilan dari proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak sekolah saja, tetapi peran keluarga dan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan, dalam mengambil sebuah keputusan akan melibatkan masyarakat. Harus ada upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mampu melibatkan masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati bersama pada satuan pendidikan. Salah satunya dengan mewujudkan perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum, dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan selain prasarana lainnya. Peran komite terhadap sarana prasarana perpustakaan sekolah hanya ditekankan pada keberadaan ruang/gedung, pendanaan, dan pemanfaatan.

4.4.1. Pendapat Komite Sekolah Terhadap Ruang Perpustakaan Sekolah.

Peran komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan perantara. Sekolah dalam menjalankan fungsi dan perannya harus melibatkan semua komponen yang ada dengan memberdayakan semua potensi sekolah agar tercapai misi sekolah. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah duduk bersama merencanakan Program Kerja Sekolah.

Dalam musyawarah banyak program sekolah yang melibatkan orangtua siswa, diantaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan tersedianya sarana prasarana perpustakaan.

Berikut hasil wawancara Peneliti dengan informan Kah dan informan Mat

“Selama saya menjadi komite, pernah disinggung tentang perpustakaan, tapi memang sudah punya ruang perpustakaan” (Kah)

“Untuk saat ini masih membicarakan target pembangunan masjid, pernah dibicarakan tentang perpustakaan, dengan menggunakan bekas ruang pembibitan tanaman” (Mat)

Dari informan Kah dan informan Mat menunjukkan tidak berperan pada ruang perpustakaan, mereka sebagai komite tidak harus menunggu pihak sekolah tetapi harus berani untuk mengemukakan apa yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan mutu pendidikan. Lokasi ruang perpustakaan jauh dari pusat belajar.

Kepasifan peran komite terhadap ruang perpustakaan juga terjadi pada informan lainnya, bahkan semua informasi komite tidak ada yang mengusulkan agar sekolah menyelenggarakan ruang perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan. Berikut hasil wawancaranya.

”Belum, sekarang lebih terfokus pada pembangunan ruang belajar”. (Sol)

“Saya rasa belum, soalnya sekolah perlu pemagaran. “La ...sekolah saja belum membicarakan perpustakaan”. (Ceh)

“Bapak Kepala sekolah itu baik sekali dan kelihatan orang yang tegas untuk pembahasan pembangunan gedung kemaren kami diundang dan sekolah ini bakal maju, tapi tidak menyinggung-nyinggung gedung atau ruang perpustakaan”.(Dja)

“Wah gimana ya sekarang saja kebutuhan sekolah sudah sangat banyak, mungkin kalau kebutuhan sekolah sudah terpenuhi baru saya usulkan”. (Dik)

Dengan kepasifan informasi dari komite akhirnya timbul pertanyaan peneliti sebenarnya menurut komite perpustakaan itu penting apa tidak. Demikian informasi yang diperoleh Git.

“Perpustakaan itu sangat Penting! Karena dengan perpustakaan itu bisa diketahui minat dan bakat siswa, seperti saat ini memang belum punya ruangnya, masukan saya kepada sekolah yaitu dengan mengusulkan kepada Pak Camat melalui Musrembang untuk membebaskan satu rumah untuk akses pintu menuju gerbang sekolah karena kalau hujan itu sangat becek sekali kasihan anak-anak sepatunya lengket dengan tanah, juga mengajukan proposal melalui dana *Block Grand* untuk konblok, pemagaran, serta kelengkapan sarana belajar mengajar”. (Git)

Dianggap penting keberadaan perpustakaan tetapi informan Git masih memprioritaskan pada sarana prasarana yang lain. Saran dan masukan Komite

Sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama sarana prasarana perpustakaan dari jawaban yang diberikan belum ada kepedulian dengan prasarana perpustakaan, walaupun informan mengatakan bahwa perpustakaan itu dianggap penting.

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan, dalam kesempatan rapat yang diadakan sekolah dengan orang tua murid dalam hal ini komite sekolah, ada tiga kepala sekolah yang menyinggung tentang perpustakaan, tetapi dua informan tidak menjalankan perannya terkesan pasif dengan alasan sudah ada ruang perpustakaan, dan satu informan lebih mendukung pembangunan prasarana kantin dan tempat ibadah terlebih dahulu, baru pembangunan perpustakaan. Dan lima sekolah belum pernah membicarakan perpustakaan pada kesempatan rapat koordinasi dengan komite, karena satu sekolah lebih menekankan pembangunan ruang belajar, satu sekolah ingin pemagaran, satu informan lebih mengusulkan pada membuka akses gerbang masuk sekolah dengan berupaya melakukan pembebasan rumah warga, satu sekolah lebih pada memenuhi kebutuhan prasarana yang dianggapnya penting, dan satu informan lagi belum pernah sama sekali dibicarakan ruang perpustakaan pada kesempatan rapat.

Belum satupun informan yang mengusulkan atau menyarankan tentang keberadaan perpustakaan, begitupun dari pihak sekolah lebih pada memenuhi prasarana yang dibutuhkan saat ini, komite belum dengan aktif menjalankan perannya dalam mewujudkan ruang perpustakaan.

Peran yang dilakukan juga terbatas pada kebutuhan yang menurut informan tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah saat ini, dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan belum pernah komite sekolah memberikan saran untuk memiliki sarana prasarana perpustakaan dan masukan dari komite, masih dipusatkan pada kebutuhan ruang praktek, kebutuhan bahan.

Peran Komite Sekolah merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah yang diharapkan untuk memberikan sumbangsih kepada sekolah sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Diantaranya Komite Sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator antara sekolah dengan organisasi lain untuk memajukan dan memperbaiki mutu belajar mengajar sekolah, dan berperan aktif.

4.4.2. Pendapat Komite Sekolah Terhadap Koleksi Perpustakaan

Komite Sekolah merupakan salah satu penyandang dana dalam mewujudkan koleksi perpustakaan juga untuk melaksanakan operasional kegiatan sekolah untuk memajukan sekolah baik dalam segi kualitas akademik maupun non akademik. Demikian hasil wawancara dengan informan Kah.

”Tentunya masalah dana darimana saja itu bukan urusan saya, kata orang sunda teh itu pamali, kalau dana, masalah yang sangat sensitif selama Bapak Jamas mengundang saya baik untuk merembung bangunan kelas, atau bangunan-bangunan yang ada di sekolah ini pasti saya dilibatkan terutama saya selaku komite sekolah selalu memantau keamanannya selain rumah saya dekat sekolah itu lebih memudahkan saya, kalau secara resmi kami dari Komite belum memberikan dana untuk perpustakaan, kalau fungsinya untuk apa saja saya tidak tahu, tanyakan hal itu kepada bapak kepala. Mungkin sudah disampaikan melalui surat, kalau seperti itu tidak perlu persetujuan komite tidak masalah, yang penting ada pemberitahuan kepada orangtua saja”. (Kah)

Sudah menjadi kebiasaan dari satuan pendidikan pada acara rapat tentang program sekolah akan melibatkan orangtua siswa atau komite sekolah, dengan diundang orangtua siswa untuk merembukkan suatu masalah biasanya yang menyangkut kekurangan dana. Pada ajang ini komite sekolah menjalankan perannya sebagai pemberi saran dan masukan. Diluar kegiatan ini komite akan bersifat pasif. Seperti dikatakan informan Kah program yang menyangkut dana menurutnya sangat sensitif dan terkesan mengikuti saja apa yang diprogramkan oleh sekolah.

Keterbatasan yang dimiliki perpustakaan memerlukan bantuan dari Komite Sekolah dengan pengumpulan dana bagi perkembangan perpustakaan. (Zen, 2006)

Berikut petikan wawancara dengan informan Mat dan informan Ceh. Dikatakan oleh Mat masalah kebutuhan dana untuk program perpustakaan sekolah itu menjadi kewajiban sekolah untuk menentukan berapa besarnya anggaran yang diperlukan, komite sekolah mempercayakan kepada sekolah dan akan menyetujui saja.

”Harusnya yang lebih paham kepala sekolah ya untuk urusan seperti ini, semenjak Bapak jadi komite belum pernah mengangarkan atau menyumbang koleksi untuk perpustakaan, dana sumbangan akan digunakan

pada keperluan yang sangat penting, untuk saat ini membangun masjid, kalau sekarang memang sumbangan sebagian untuk menyumbang pembangunan masjid. (Mat)

“Sayangnya kami selaku komite belum membicarakan tentang perpustakaan, jadi ya memang belum pernah memberikan anggaran untuk perpustakaan”. (Ceh)

Dana atau uang sebagai motor utama untuk mewujudkan koleksi Perpustakaan Sekolah yang hampir semua SMKN dan untuk tempat informan Mat bantuan dari orangtua akan dialokasikan untuk pembangunan masjid. Dikatakan informan Dja dana komite bukan untuk koleksi perpustakaan tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yaitu ruang kelas. Berikut informasinya.

“Bagaimana Buk?! Dana yang dari komite sekolah saat ini hanya bisa digunakan untuk membangun ruang kelas, karena masih kurang, apalagi untuk perpustakaan”.(Dja)

Hal yang sama diungkapkan oleh informan Dik, dalam mengalokasikan dana komite harus menggunakan skala prioritas, dengan dana komite akan digunakan untuk membangun ruang praktek dan gerbang sekolah juga konblock. Berikut hasil wawancaranya.

”Dana untuk perpustakaan, sebenarnya tidak masalah untuk sekolah karena semua kebutuhan kelas dan laboratorium sudah terpenuhi bahkan sudah ada ruang grafis, itu lo tempat untuk menggambar anak-anak. Karena kalau SMK itu tidak hanya punya ruang membaca dan mendengarkan tapi harus melihat langsung dan mempraktekkannya”. Dan kita lihat skala prioritas mana yang lebih penting! Ya itu tadi saat ini perlu gerbang sebagai akses jalan masuk dan konblock saja belum punya”.(Dik)

Dari hasil wawancara dengan informan Dik dapat disimpulkan komite sangat berperan dalam memajukan sekolah dan berusaha meningkatkan mutu layanan pada sekolah tetapi untuk perpustakaan belum masuk pada skala prioritas. Senada pula dengan informan Git pengalokasian dana untuk perpustakaan masuk pada urutan terakhir.

“Sebenarnya dana tidak menjadi masalah tetapi dalam menghadapi akreditasi tahun ini, pihak sekolah sedang membangun kantin sekolah dan tempat ibadah masjid, untuk memenuhi ruang perpustakaan bisa memanfaatkan ruang praktek perhotelan untuk sementara beralih fungsi menjadi Perpustakaan Sekolah. Ha ha ha. Dan belum ada anggarannya secara khusus untuk buku”. (Git)

Dapat ditarik kesimpulan hasil dari wawancara diatas bahwa semua informan belum menyumbangkan dana yang dialokasikan untuk koleksi perpustakaan, tetapi diketahui bahwa tempat informan Kah menyumbangkan buku untuk koleksi perpustakaan melalui putra/putrinya yang lulus sebagai bukti sumbangsuhnya terhadap almamaternya. Dan untuk tempat informan Mat diketahui pada kepengurusan komite periode tahun ajaran sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dana sebesar 2,7 juta untuk menambah koleksi perpustakaan. Dan untuk enam informan belum pernah menyumbang koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk dana maupun buku dikarenakan belum memiliki ruangan dan terbatasnya dana. Dana diprioritaskan untuk kepentingan sarana prasarana yang lebih dibutuhkan oleh sekolah.

Padahal untuk mewujudkan koleksi perpustakaan sekolah yang dapat memberikan manfaat secara maksimal apabila koleksi perpustakaannya memenuhi prinsip koleksi yaitu jumlah koleksi yang memadai, sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai, lengkap selain ada buku paket juga terdapat bacaan yang bersifat hiburan, dan koleksi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

4.4.3. Pendapat Komite Sekolah Terhadap Pemanfaatan Perpustakaan

Komite selaku wakil dari orangtua murid yang ikut berperan dalam merencanakan program sekolah dan berperan aktif, baik memberikan saran, pertimbangan dan pengawasan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan salah satu dengan memanfaatkan sarana prasarana di perpustakaan.

Komite sekolah berperan sebagai pengguna sekaligus pembina dan mendorong siswa menggunakan perpustakaan secara maksimal. (Zulfikar Zen, 2006: 15).

Hasil wawancara dengan informan Kah dan informan Mat yang sekolahnya ada perpustakaan peran yang dilakukan selaku orangtua murid saran kepada putra putrinya sebagai berikut.

”Bapak ma tidak pernah memaksakan kehendak anak, khan mereka sudah dewasa, silahkan saja yang taat dengan bapak/ibu guru di sekolah, jangan sampai membuat onar, seperti tawuran anatar sekolah. Walaupun laki-laki tapi bapak selalu kontrol kalau pulangny telat”. (Kah)

”Kebetulan di rumah ada komputer, biarkan saja mengerjakan tugasnya dikomputer (maksudnya internet) Itu saya serahkan saja dengan dia, yang paling tau khan mereka, Bapak ma hanya membiayai saja. Makanya selalu saya nasehati jangan kecewakan orangtua, sekolah yang bener”. (Mat)

Dari informasi Kah dan Mat dapat ditarik kesimpulan peran komite selaku pemberi saran dalam pemanfaatan perpustakaan belum dilakukan. Sudah pasti di sekolah ada perpustakaan yang menyimpan banyak informasi yang dibutuhkan putra putrinya tidak disarankan untuk memanfaatkannya, dengan lath karena jaman internet maka disarankan untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan melalui internet.

Hal sama dilakukan informan Dik dan Git yang tidak mempunyai perpustakaan kepada putra putrinya disarankan untuk menggunakan internet dalam mengerjakan tugas dari gurunya selain murah dapat ditemukan semua informasi yang dibutuhkan dengan tanpa memikirkan dampak positif dan negatifnya. Berikut hasil wawancaranya.

”Kalau disuruh ke perpustakaan, saat ini belum ada, jaman sekarang sudah canggih, bisa saja dikerjakan diinternet, kebetulan anak saya yang satu ini, baik sekali dan tidak neko-neko bila dibanding dengan saudaranya yang lain, paling takut dia itu terlambat”. (Dik)

”Saat ini ma bisa saja mencari di internet, semua informasi bisa dicari melalui iternet, gampang saja tinggal klik saja, sekarang itu sudah canggih, bahkan untuk permesinan lebih lengkap di internet dibandingkan dengan di buku, kalau ada juga harga bukunya mahal sekali”. (Git)

Berbeda dengan informasi Sol, Ceh, Dja dan Hid dalam menjalankan peran pada pemanfaatan perpustakaan tidak dilakukan karena tidak memiliki perpustakaan. Komite merupakan wakil orang tua murid dalam menyarankan dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah, mereka lebih menyerahkan semua urusan dalam mengerjakan tugas diserahkan kepada putra putrinya atau mengikuti saran bapak ibu gurunya. Hal seperti ini yang lebih memahami si anak sendiri.

"Ikuti saja apa yang disarankan oleh gurunya, saya ini percaya sama anak, kalau mendapatkan tugas dari gurunya ya harus dikerjakan, kalau tidak bisa nanti nilainya jelek-jelek, nanti juga malau sendiri". (Sol)

"Kalau ada perpustakaan ya silahkan saja, sekolah belum punya perpustakaan saya kira bisa saja dikerjakan secara berkelompok dengan teman". (Ceh)

"Itu terserah kepada bapak/ibu guru saja di sekolah, kalau anak murid itu hanya mengikuti apa menjadi tugasnya" (Dja)

"Bagaimana, perpustakaan belum ada, masalah tugas terserah dengan guru saja dech". (Hid)

Komite sekolah selaku orangtua murid dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang perpustakaan patut dipertanyakan, terbukti semua informan tidak memberikan saran dalam memanfaatkan fasilitas atau koleksi yang berada di perpustakaan, dan menyarankan untuk mengikuti perintah guru dan kurang memperdulikan tentang keberadaan perpustakaan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman komite tentang perpustakaan sangat penting, sehingga bisa menjadi pijakan dalam menjalankan perannya terhadap kemajuan mutu layanan pendidikan di sekolah tempat putra putrinya menuntut ilmu. Dengan kurangnya pemahaman tersebut komite belum bisa memberikan saran, pertimbangan, yang mendukung keberadaan perpustakaan juga peran dan manfaat perpustakaan bagi putra putrinya.

Karena hampir sekolah tidak memiliki perpustakaan maka pemanfaatan perpustakaan belum tercapai, peran komite memang pasif, selaku orang tua merasa tidak perlu berhubungan dengan sekolah jika tidak ada keperluan begitu juga sebaliknya, terlebih dalam memberikan perhatian terhadap pemanfaatan perpustakaan. Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, atau terbatasnya waktu komite tidak menjalankan perannya, sehingga selama ini peran komite belum begitu nyata dirasakan oleh kedua belah pihak. Yang dirasakan memang komite sekolah dibentuk hanya untuk tujuan sesaat, yakni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh subsidi.

Sehingga komite sekolah belum melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Seperti belum maksimal mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, belum memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan tentang kebijakan dan program sekolah, tentang perpustakaan sekolah.